

KONSEP NEGARA ISLAM DALAM POLEMIK PEMIKIRAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR: KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Salsabila Syifana Alkamila
IAIN Palangka Raya
salsabilaaa251205@gmail.com

Khairun Nisa
IAIN Palangka Raya
khrn6nisa@gmail.com

Nur Citra Juniarti Mandiri
IAIN Palangka Raya
mandiricitra907@gmail.com

Surya Sukti
IAIN Palangka Raya
suryasukti72@gmail.com

Abstract *The intersection of religion and the state remains a recurring theme in the discourse of Islamic political thought in Indonesia. This study explores the contrasting views of Soekarno and Mohammad Natsir regarding the concept of an Islamic state. Soekarno advocated for the separation of religion from state affairs to preserve political neutrality, while Natsir believed the state should serve as a medium to implement Islamic values. The aim of this research is to provide a comprehensive understanding of their ideological differences and examine how their thoughts influenced the development of political discourse in Indonesia. Employing a qualitative approach through literature review, the study analyzes original writings and public responses from both figures. The findings reveal that their opposing views stem not only from theological interpretations but also from distinct socio-political backgrounds and historical experiences. The intellectual exchange between Soekarno and Natsir has significantly contributed to shaping a framework for Islamic political thought that aligns with the diverse and evolving context of Indonesia as a pluralistic nation.*

Keywords: *Polemical Thought, Soekarno, Muhammad Natsir, Islamic State.*

Abstrak Peraturan antara agama dan negara menjadi tema perdebatan yang terus bergulir dalam ranah pemikiran politik Islam di Indonesia. Kajian ini berfokus pada perbedaan pandangan antara Soekarno dan Mohammad Natsir terkait konsep negara Islam. Soekarno berpandangan bahwa pemisahan agama dari urusan kenegaraan adalah langkah strategis untuk menjaga objektivitas negara, sedangkan Natsir menilai bahwa negara sepatutnya menjadi sarana pelaksanaan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif perbedaan perspektif kedua tokoh, termasuk akar ideologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur terhadap karya-karya asli kedua tokoh dan berbagai respons yang mereka hasilkan dalam wacana publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan keduanya dipengaruhi oleh latar belakang sosial-politik, pengalaman hidup, serta interpretasi masing-masing terhadap ajaran Islam dan realitas kebangsaan. Perdebatan intelektual antara Soekarno dan Natsir memberikan kontribusi yang penting dalam membentuk kerangka pemikiran politik Islam yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa yang plural dan dinamis.

Kata Kunci: Polemik Pemikiran, Soekarno, Muhammad Natsir, Negara Islam.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai relasi antara Islam dan negara merupakan suatu diskursus yang tak lekang oleh waktu dalam sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia. Isu ini menjadi semakin menarik ketika dua tokoh sentral dalam sejarah bangsa, Soekarno dan Mohammad Natsir, memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental. Soekarno, dengan latar belakang pemikiran nasionalis dan sekularistiknya, mengadvokasi pemisahan agama dari ranah negara. Sebaliknya, Mohammad Natsir, sebagai seorang intelektual Muslim dan tokoh pergerakan Islam, meyakini bahwa Islam memiliki relevansi fundamental sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bernegara. Perbedaan pandangan ini tidak

hanya mencerminkan dinamika pemikiran politik pada masanya, tetapi juga terus bergema dalam wacana kebangsaan Indonesia hingga kini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran Soekarno dan Natsir secara terpisah atau dengan tokoh lainnya dalam konteks yang lebih luas. Sudarti (2020) dalam karyanya menelaah relasi agama dan negara melalui pemikiran politik Soekarno dan Fazlur Rahman. Studi oleh Aminullah (2020) secara khusus mengkaji pemikiran Soekarno tentang relasi agama dan negara. Sementara itu, Rizqi dan Ahmad (2022) menganalisis pemikiran Mohammad Natsir mengenai agama dan negara. Kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami masing-masing pemikiran tokoh. Namun, perlu dicatat bahwa kajian-kajian tersebut cenderung menganalisis pemikiran Soekarno dan Natsir secara terpisah atau dengan tokoh lainnya, dan belum secara mendalam membahas polemik pemikiran di antara keduanya untuk memahami secara komprehensif interaksi intelektual mereka terkait isu negara Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang perdebatan pemikiran antara Soekarno dan Mohammad Natsir terkait konsep negara Islam. Untuk mendalami polemik tersebut, penelitian ini juga akan membahas biografi kedua tokoh yang berkaitan dengan perkembangan pandangan politik mereka. Penelitian ini akan mengulas garis besar pemikiran politik Soekarno, termasuk konsep Nasakom dan pandangannya mengenai sekularisme. Di sisi lain, akan dijelaskan pula pemikiran politik Mohammad Natsir yang menekankan pentingnya Islam sebagai dasar dan ideologi negara.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam perbedaan pandangan antara Soekarno dan Natsir dalam melihat hubungan antara negara dan agama. Hal ini mencakup dasar-dasar filosofis pemikiran mereka, cara mereka menafsirkan teks agama dan sejarah, serta dampak sosial dan politik dari pandangan masing-masing. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri interaksi intelektual antara kedua tokoh melalui analisis terhadap tanggapan dan kritik yang mereka sampaikan satu sama lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana perdebatan ini berkontribusi dalam membentuk wacana hubungan antara negara dan agama di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemikiran politik Soekarno dan Mohammad Natsir, khususnya yang berkaitan dengan konsepsi negara Islam serta polemik yang berkembang di antara keduanya. Data primer dalam penelitian ini meliputi Karya-karya Soekarno yang dijadikan acuan antara lain *Surat-Surat Islam dari Endeh*, serta artikel-artikel yang diterbitkan di majalah *Panji Islam* dan *Pedoman Masyarakat*. Sementara itu, karya-karya Mohammad Natsir yang dianalisis mencakup tanggapan-tanggapannya terhadap pemikiran Soekarno yang dipublikasikan dalam majalah *Al-Lisan* dan *Panji Islam*. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang relevan, mencakup buku-buku biografi, karya ilmiah, artikel jurnal, serta sumber daring (*web*) yang kredibel, guna memperkaya pemahaman dan menyediakan kerangka kontekstual yang komprehensif. Proses penelitian ini akan dilakukan melalui analisis materi terhadap sumber-sumber data untuk memahami gagasan kedua tokoh serta melakukan perbandingan perspektif mereka mengenai isu yang diteliti. Lebih lanjut, proses ini juga bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dinamika polemik yang terjadi antara Soekarno dan Mohammad Natsir terkait isu negara Islam, termasuk argumentasi dan latar belakang pemikiran yang mendasarinya.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Soekarno

Soekarno, tokoh besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 6 Juni 1901. Sejak awal, ia tampaknya telah ditakdirkan menjadi figur yang berpengaruh dan dihormati. Lahir dari keluarga bangsawan, ia merupakan putra dari Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Dari rahim seorang ibu berdarah ningrat Bali yang menganut agama Hindu, serta ayah seorang guru yang disegani lahirlah Sang Putra Fajar yang nanti akan terkenal dan sosoknya dikenang selalu. Saat baru lahir, Soekarno diberi nama Koesno Sosrodihardjo.

Namun, karena sering sakit di masa kecil, namanya kemudian diubah menjadi Soekarno ketika ia menginjak usia lima tahun dengan harapan pergantian nama tersebut membawa keberkahan bagi kesehatannya.

Meski berasal dari keluarga ningrat, kehidupan keluarga Soekarno tidaklah serba berkecukupan. Masa itu masih berada dalam cengkeraman kolonialisme Belanda, yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi banyak keluarga Indonesia, termasuk keluarga Soekarno. Kendati demikian, ia tetap memperoleh akses pendidikan formal. Pada tahun 1908, Soekarno menempuh pendidikan dasarnya di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), sebelum kemudian melanjutkan ke *Europeesche Lagere School* (ELS) di Mojokerto hingga menyelesaikan jenjang tersebut pada tahun 1919 (Setiadi, 2017, pp. 21–22).

Setelah itu, ia bersekolah di *Hogere Burger School* (HBS) di Surabaya, berkat dukungan dari HOS Tjokroaminoto, seorang sahabat ayahnya yang juga merupakan tokoh penting dalam pergerakan nasional. Tidak hanya memberikan tempat tinggal, Tjokroaminoto juga membimbing dan memperkenalkan Soekarno muda kepada dunia politik serta tokoh-tokoh pergerakan seperti Abdul Muis, Agus Salim, dan Alimin. Pengalaman belajar di HBS memberi bekal penting dalam membentuk wawasan dan kesadaran politik Soekarno.

Setelah menamatkan pendidikannya di HBS pada 1921, Soekarno pindah ke kota Bandung dan tinggal dengan Haji Sanusi. Di kota inilah ia melanjutkan studinya di *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (kini Institut Teknologi Bandung/ITB), mengambil jurusan teknik sipil. Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926 (MA, 2024).

Di sela-sela pendidikannya, Soekarno telah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia pergerakan. Ia sempat aktif dalam organisasi Tri Koro Dharmo, yang kemudian dikenal sebagai Jong Java. Di Bandung, ia juga mendirikan kelompok diskusi intelektual bernama *Algemeene Studieclub*, yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) salah satu kendaraan politik awal perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ia dirikan dan pimpin. Organisasi yang ia dirikan mengalami pertumbuhan pesat dan berhasil menarik perhatian banyak simpatisan, hingga akhirnya membuat pihak kolonial Belanda merasa terancam. Akibatnya, ia ditangkap pada Desember 1929 dan

mulai menjalani proses pengadilan pada 8 Agustus 1930 di Bandung. Ia divonis hukuman penjara selama empat tahun dan ditempatkan di Lapas Sukamiskin. Sebelum putusan tersebut dijatuhkan, ia terlebih dahulu menyampaikan pidato pembelaan yang penuh semangat, dan pidato tersebut kemudian dikenal luas oleh masyarakat serta diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Indonesia Menggugat*.

Salah satu karya Soekarno yang dianggap paling merefleksikan jati dirinya adalah buku berjudul *Di Bawah Bendera Revolusi*. Buku ini memiliki ketebalan 630 halaman, dan Soekarno menulis tulisan pertamanya pada tahun 1926 yang berjudul *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme*. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk memahami pemikiran Soekarno di masa mudanya, saat ia baru berusia 26 tahun (Aminullah, 2020a, p. 39).

Soekarno diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 dan memegang jabatan tersebut hingga tahun 1967. Selama kepemimpinannya, ia berupaya menyatukan kekuasaan dan membentuk fondasi negara yang baru merdeka. Ia memainkan peran kunci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai rintangan yang muncul dari dalam negeri maupun dari tekanan internasional.

Di masa jabatannya, Soekarno merumuskan gagasan politik bernama “Nasakom,” singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini dimaksudkan untuk menyatukan tiga kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia ke dalam satu kerangka pemerintahan. Namun, pendekatan ini menuai pro dan kontra, serta tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh elemen bangsa. Indonesia pun mengalami berbagai gejolak politik dan kesulitan ekonomi sepanjang masa pemerintahannya.

Krisis besar terjadi pada tahun 1965 ketika pecahnya peristiwa berdarah dan pergolakan politik mengarah pada peralihan kekuasaan melalui campur tangan militer. Akibatnya, Soekarno tersingkir dari posisi kepemimpinan. Ia kemudian menjalani masa pengasingan di bawah pengawasan ketat hingga akhirnya wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta (Hukum, 2025).

B. Pemikiran Politik Soekarno

Salah satu kontribusi paling signifikan dari pemikiran politik Soekarno dalam dinamika politik Indonesia adalah lahirnya konsep-konsep seperti Nasakom, Nasaos, dan gotong royong. Konsep Nasakom singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme merupakan gagasan politik Soekarno yang menjadi ciri utama sistem Demokrasi Terpimpin. Gagasan ini dirancang sebagai bentuk akomodasi terhadap kepentingan tiga kekuatan utama dalam politik Indonesia saat itu, yakni militer (TNI), kelompok Islam, dan kaum komunis.

Namun, seiring waktu, muncul kekhawatiran dari masyarakat bahwa Soekarno lebih condong ke arah ideologi komunis. Untuk meredam kesan tersebut, Soekarno kemudian memperkenalkan konsep baru yang disebut Nasasos (nasionalisme, agama, dan sosialisme), sebagai upaya menggantikan konsep Nasakom. Dengan demikian, Nasasos menjadi representasi dari pemikiran politik Soekarno yang berupaya menjaga keseimbangan ideologis antara kekuatan nasionalisme, nilai-nilai agama, dan prinsip-prinsip sosialisme.

Nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno memiliki karakter anti-kolonial dan anti-imperialis yang kuat. Dalam perspektif ideologis, nasionalisme Soekarno dapat dipandang sebagai reaksi terhadap ideologisasi yang terlalu puritan. Ketika kelompok agama (khususnya Islam) dan kelompok kiri (kaum Marxis) saling berupaya menjadikan ideologi mereka sebagai dasar tunggal negara, Soekarno justru mendorong gagasan sekularisme yang menuntut pemisahan antara agama dan negara. Ia mengacu pada model negara Turki dan negara-negara Barat di Eropa sebagai contoh ideal dari sekularisme (Sudarti, 2020, pp. 76–77). Menurut Soekarno, agama sebaiknya difungsikan sebagai pedoman spiritual dalam kehidupan individu (bersifat ukhrawi), sedangkan negara harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip duniawi (sekuler) yang lebih praktis dan rasional dalam mengatur urusan pemerintahan. Salah satu konsep penting lain yang dikembangkan oleh Soekarno adalah konsep gotong royong. Bagi Soekarno, gotong royong bukan sekadar slogan, melainkan merupakan prinsip fundamental yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Gotong royong, menurutnya, telah mengakar sebagai bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia dan

mencerminkan semangat kolektivitas serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, Soekarno menilai bahwa semangat gotong royong mencerminkan kemandirian bangsa. Kemajuan ataupun kemunduran Indonesia, dalam pandangannya, sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya sendiri, bukan oleh ketergantungan terhadap bantuan asing. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah berdikari yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Soekarno menegaskan bahwa tidak seharusnya rakyat Indonesia menaruh harapan kepada kekuasaan eksternal untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan kekuatan nasional. Ia menolak segala bentuk ketergantungan terhadap bangsa lain, karena menurutnya, identitas dan martabat suatu bangsa akan terwujud apabila bangsa tersebut mampu membangun dirinya secara mandiri (Dedi, 2017, p. 529).

C. Biografi Muhammad Natsir

Mohammad Natsir, yang dianugerahi gelar adat Datuk Sinaro Panjang, lahir di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada hari Jumat, 17 Jumadil Akhir 1326 H, bertepatan dengan 17 Juli 1908. Ibunya bernama Khadijah, sedangkan ayahnya, Mohammad Idris Sutan Saripado, adalah seorang pegawai kelas bawah yang pernah menjabat sebagai juru tulis di kantor Kontroler Maninjau, sebelum kemudian dipindahkan sebagai sipir di Ujung Pandang pada tahun 1918. Natsir mempunyai tiga saudara kandung, yakni Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun.

Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan yang kuat akan nilai keagamaan dan intelektual. Ia memulai pendidikan formal di sekolah Belanda dan menimba ilmu agama dari berbagai ulama setempat. Natsir sangat ingin bersekolah di *Hollandsche Inlandsche Schoolen* (HIS) yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1914 sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan dasar yang lebih berkualitas bagi kalangan etnis Tionghoa serta penduduk pribumi. namun keinginannya itu tidak dapat terwujud karena statusnya sebagai anak dari seorang pegawai rendahan. Oleh karena itu, ia

melanjutkan pendidikannya di sekolah partikelir HIS Adabiyah di Padang (Mustofa, 2024, pp. 16–17).

Orang tuanya kemudian memindahkannya ke HIS pemerintah di Solok, di mana ia tinggal dengan saudagar yang bernama Haji Musa. Di sana, ia aktif belajar agama pada malam hari, sekolah di pagi hari, dan mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah pada sore hari. Setelah tiga tahun, Natsir kembali melanjutkan sekolah di HIS Padang dan tinggal bersama kakaknya, Rubiah. Pada tahun 1923, ia diterima di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang dan menjadi anggota Jong Islamic Bond (JIB) cabang Padang. Ia kemudian meneruskan ke AMS (*Algemene Middelbare School*) di Bandung tahun 1927, dan memperoleh beasiswa dari pemerintah kolonial Belanda. Di Bandung, ia mulai mendalami ilmu keislaman melalui organisasi Persatuan Islam (PERSIS), hingga akhirnya menjadi ketuanya.

Kiprah perjuangannya dimulai sejak masa sekolah. Ia aktif di kependuan JIB dan menjabat sebagai ketua JIB cabang Bandung pada tahun 1928-1932 (Falah, 2012, pp. 48–50). Pada masa ini, ia berinteraksi dengan berbagai tokoh penting seperti Wihono Purbohadidjono, H. Agus Salim, Syamsulrijal, A. Hassan, dan Ahmad Soerkati. Khususnya H. Agus Salim dan A. Hassan, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemikirannya. Selain aktif di Partai Islam Indonesia (PII), Natsir juga mendirikan lembaga pendidikan Islam modern bernama PENDIS (Pendidikan Islam) di Bandung pada tahun 1932 dan menjabat sebagai direktur selama satu dekade. Pada tahun 1940-1942, ia dipercaya menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung.

Pasca kemerdekaan, Natsir menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 1945-1946, dan kemudian dipercaya sebagai Menteri Penerangan dalam tiga kabinet berbeda (1946-1949). Ia memimpin Partai Masyumi sebagai Ketua DPP pada periode 1949-1958. Saat Indonesia berstatus sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), Natsir menolak tawaran menjadi bagian dari Perdana Menteri Negara Bagian RIS di Yogyakarta. Sebaliknya, ia melakukan lobi intensif kepada negara-negara bagian untuk melebur kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upayanya membuahkan hasil ketika pada 3 April

1950 ia mengajukan “*Mosi Integral*” dalam sidang Parlemen RIS, yang menjadi titik balik penyatuan kembali Indonesia. Atas keberhasilannya, Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Perdana Menteri pertama NKRI dalam sistem parlementer (Luth, 1999, p. 25).

Kepemimpinannya diwarnai tantangan berat, termasuk keberadaan kelompok-kelompok bersenjata seperti Darul Islam, PKI, dan Laskar MMC, serta ketegangan dengan PNI yang merasa dikecewakan karena tidak dilibatkan dalam kabinet. Perbedaan pandangan dengan Soekarno, terutama terkait pendekatan terhadap masalah Irian Barat dan hubungan dengan umat Islam, semakin memperuncing ketegangan antara keduanya. Natsir menolak pendekatan konfrontatif terhadap Belanda, dan konsisten pada hasil KMB.

Konflik antara Natsir dan Soekarno berlanjut hingga pada 17 Agustus 1959, Soekarno membubarkan Partai Masyumi. Meskipun awalnya diberikan pengampunan, Natsir dan sejumlah tokoh Masyumi ditangkap setibanya di Jakarta karena dituduh terlibat dalam gerakan PRRI/Permesta. Ia menjalani masa pengasingan dan penahanan politik antara tahun 1960–1966 di Batu (Malang) dan kemudian dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) yang terletak di Keagungan, Jakarta (Hamzani & Aravik, 2021, p. 287).

Pasca Orde Lama, Natsir tidak kembali aktif di panggung politik, meskipun semangat juangnya tidak pernah padam. Pada masa awal Orde Baru, upaya menghidupkan kembali Partai Masyumi tidak mendapat restu pemerintah. Sebagai alternatif, pada 1967 ia bersama para ulama yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai wadah perjuangan dakwah yang lebih inklusif dan multidimensi. Ia tetap konsisten dengan prinsip bahwa dakwah bisa dilakukan melalui beragam jalur, termasuk politik, pendidikan, dan sosial.

Pada tahun 1980, Natsir turut menandatangani Petisi 50 bersama tokoh-tokoh nasional lain, sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter. Karena keberaniannya menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, M. Natsir dikenai larangan bepergian ke luar negeri tanpa melalui proses hukum yang semestinya. Larangan tersebut diberlakukan tanpa dasar pengadilan dan terus berlanjut hingga akhir hayatnya. Mohammad

Natsir wafat pada 7 Februari 1993 di Jakarta dan dimakamkan di TPU Karet, Tanah Abang. beliau meninggalkan jejak panjang dalam sejarah perjuangan Islam, politik, dan dakwah di Indonesia (Sumanto, 2021, pp. 2-3).

D. Pemikiran Politik Muhammad Natsir

Dalam setiap komunitas atau negara, tanpa terkecuali, memiliki ideologi dan falsafah hidup tertentu, baik itu fasisme, komunisme, kapitalisme, maupun bentuk lainnya. Begitu pula dengan seorang Muslim yang juga memiliki ideologi fundamental sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Menurut Mohammad Natsir, ideologi dan pandangan hidup seorang Muslim memiliki cakupan yang sangat luas, namun keseluruhan prinsip tersebut secara esensial dapat dirangkum dalam satu ayat Al-Qur'an, yakni Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah, yang berarti menjalani penghambaan diri kepada-Nya (*at-ta'abbud li Allah*). Apabila manusia mampu melaksanakan fungsi dan tugas tersebut secara tepat, maka ia akan mencapai makna eksistensinya. Sebaliknya, jika tidak, ia justru akan mengalami kehampaan dan kehilangan arah hidup. Konsep ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual-ritual formal yang hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia (*'abd*) dan Tuhannya (*ma'bud*), melainkan mencakup juga peran manusia sebagai makhluk sosial (*ḥabl min al-nās*) serta tanggung jawabnya terhadap alam *semesta* (*ḥabl min jamī' al-'ālam*).

Sayyid Quṭb mengemukakan bahwa esensi ibadah itu tercermin dalam dua hal utama. Pertama, keberlanjutan makna penghambaan diri kepada Allah yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran sebagai hamba, manusia harus benar-benar meyakini bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah, sedangkan segala yang lain hanyalah hamba. Kedua, adalah orientasi kehidupan yang sepenuhnya tertuju kepada Allah dalam setiap aktivitas, baik yang lahir maupun batin. Artinya, seluruh aktivitas seorang hamba seharusnya senantiasa berada dalam bingkai ketundukan dan pengabdian mutlak kepada Allah.

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai makhluk ciptaan, manusia diberi seperangkat aturan yang mengatur relasi antara dirinya dan Tuhannya, antar

sesama manusia, serta dengan alam semesta. Dalam konteks hubungan vertikal, Allah telah menetapkan aturan yang jelas, seperti tata cara salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal hubungan horizontal antar manusia dan dengan alam, Allah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar serta garis besar mengenai hak dan kewajiban sosial, baik antara individu dengan masyarakat maupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam membentuk suatu masyarakat tertentu, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan sistem yang ideal sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang dihadapi. Dengan demikian, Islam tidak menawarkan sistem sosial atau politik yang bersifat baku (*built-in*) dalam ajarannya, melainkan memberikan ruang ijtihad bagi umatnya untuk merumuskan model sosial-politik yang relevan dan aplikatif di setiap zaman (Falamsyah, 2018, pp. 132–134).

Dalam pandangan politik Mohammad Natsir, ideologi selalu berakar pada wahyu Ilahi, dengan menempatkan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan yang absolut. Kekuasaan tersebut, menurutnya, kemudian didelegasikan kepada pemimpin atau penguasa agar risalah-Nya tetap terjaga dan terlaksana dalam kehidupan masyarakat. Natsir menegaskan bahwa demi memastikan terlaksananya aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh Islam secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan kekuasaan dalam bentuk negara merupakan suatu keharusan yang tak dapat dihindari. Dengan kata lain, bagi Natsir, keterkaitan erat antara Islam dan negara merupakan sarana untuk menegakkan syariat Islam dalam ruang sosial. Segala bentuk aktivitas politik, sosial, maupun ekonomi semestinya dijalankan dalam kerangka nilai-nilai Islam, dan setiap bentuk perjuangan serta pengabdian warga negara haruslah dilandasi dengan keikhlasan serta pengabdian yang tulus kepada nilai-nilai tersebut.

Terkait dengan kepemimpinan dalam negara, Natsir memandang bahwa Islam menetapkan sejumlah kriteria moral dan etika yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak dipilih sebagai kepala negara. Islam juga memperingatkan agar kekuasaan tidak diserahkan kepada individu-individu yang tidak memenuhi standar tersebut. Bagi Natsir, gelar atau sebutan bagi kepala negara tidak bersifat esensial apakah itu khalifah, amirul mukminin,

presiden, atau yang lainnya, selama pemimpin tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ajaran Islam.

Dalam kerangka ini, Natsir menegaskan bahwa kepala negara idealnya merupakan *ulil amri* yang berasal dari bangsa atau masyarakat yang dipimpinnya, serta memiliki komitmen dan kemampuan dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pemerintahan. Syarat-syarat penting yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin negara, menurut Natsir, meliputi kewibawaan, amanah (dapat dipercaya), kecintaan terhadap agama, serta loyalitas terhadap bangsa dan tanah air. Sebab kepala negara adalah simbol dari eksistensi negara itu sendiri, maka karakter kewibawaan menjadi penting agar kebijakan dan perintah yang dikeluarkannya dapat ditaati serta diimplementasikan secara efektif oleh seluruh warga negara (Mawaddah et al., 2024, p. 149).

E. Polemik Pemikiran Soekarno dan Muhammad Natsir Tentang Negara Islam

Soekarno mulai tertarik pada isu-isu keagamaan saat menjalani hukuman di Penjara Ende, Flores. Keinginannya untuk memperluas pengetahuan tentang Islam mendorongnya untuk menulis surat kepada Ahmad Hassan sebagai Pemimpin Persatuan Islam (Persis) tujuannya untuk meminta buku terbitan organisasi tersebut. Dalam surat-suratnya, Soekarno tidak hanya meminta buku, tetapi juga menyampaikan pemikiran serta kritiknya terhadap umat Islam Indonesia. Surat-surat tersebut kemudian diterbitkan oleh Ahmad Hassan dengan judul *"Surat-Surat Islam dari Ende"* (Kasenda, 2014, p. 52).

Setelah dipindahkan dari Ende ke Bengkulu, Soekarno bergabung dengan Muhammadiyah dan mulai menulis artikel untuk *Panji Islam*, sebuah media yang terbit di Medan, serta *Pedoman Masyarakat* antara tahun 1938 hingga 1940-an. Melalui tulisan-tulisan tersebut, ia mengkritik aspek-aspek tertentu dalam masyarakat Islam Indonesia, terutama tradisi yang dianggap kolot dan penuh kekeramatan. Serangkaian artikel pertamanya diberi judul *"Memudahkan Pengertian Islam"*, yang kemudian dilanjutkan dengan *"Apa Sebabnya Turki Memisahkan Agama dari Negara"*, serta *"Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal"*

Terbang". Dalam artikel-artikel ini, Soekarno mengungkapkan pandangannya terhadap situasi sosial-politik di luar negeri serta modernisasi Islam yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Ia menyoroti bagaimana Turki memisahkan urusan negara dan agama tanpa meninggalkan Islam, yang menurutnya membawa kemajuan bagi negara tersebut. Pemikirannya cenderung mencerminkan pembaruan yang terjadi di Turki, termasuk gagasan pemisahan agama dari negara. Pada intinya, tulisan-tulisan tersebut berusaha menolak keterlibatan agama dalam urusan kenegaraan (Badri, 2020, pp. 197–198).

Soekarno memiliki tiga gagasan utama mengenai pemisahan agama dan negara. Pertama, ia merujuk pada pembaruan Islam di Turki dan menganalisis alasan di balik pemisahan agama dari negara. Secara substansial, Soekarno menunjukkan dukungannya terhadap sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Ia berpendapat bahwa agama adalah urusan akhirat yang bersifat personal antara individu dengan Tuhannya, sedangkan urusan negara sepenuhnya berkaitan dengan dunia dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan agama menjadi tanggung jawab individu, sementara negara tidak memiliki hak dan kewenangan untuk ikut campur atau memaksakan ajaran agama kepada warga negaranya (Aminullah, 2020b, pp. 41–42).

Kedua, Soekarno menilai bahwa tidak ada *ijma'* ulama yang memang secara khusus menyatakan bahwa agama harus bersatu dengan negara. Pandangannya ini didasarkan pada pemikiran Ali Abdur raziq, yang menolak pandangan mayoritas ulama dan pemikir Muslim mengenai politik Islam. Menurut Abdul raziq, agama dan politik merupakan dua aspek yang berbeda karena syariat Islam dibawa Nabi Muhammad saw. itu hanya mengatur persoalan keagamaan, moral, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Berangkat dari pemikiran ini, Soekarno menegaskan perlu secara jelas adanya pemisahan antara agama dan kekuasaan politik. Ia berpendapat bahwa penyatuan antara agama dan negara dapat menimbulkan *caesaropapisme*, di mana agama dijadikan alat politik oleh penguasa dan berpotensi menjadi sarana penindasan.

Ketiga, Soekarno meyakini tidak ada konsep negara yang secara khusus di bahas dalam Islam. Menurutnya, pemerintahan di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. bukanlah bentuk negara Islam, sebab Nabi sendiri menyebutnya hanya sebagai umat Islam. Soekarno berpendapat bahwa jika Indonesia dijadikan negara Islam dengan Islam dijadikan sebagai dasar negara, hal tersebut justru akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat. Ini dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman agama, terutama di wilayah timur yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk Islam (Sudarti, 2020, p. 87).

Maka dapat ditarik garis besar bahwasanya pemikiran Soekarno menginginkan adanya kemerdekaan Islam dari segala urusan negara karena ia berpandangan bahwa agama dan negara harus terpisah. Soekarno berpendapat seharusnya agama itu harus dipisahkan dari urusan negara agar tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan dan kekuasaan tidak memperlakukan agama hanya untuk menjalankan suatu negara.

Sebagai ideolog muslim, Natsir sangat mempercayai kebenaran agama Islam sebagai suatu ideologi dari kenegaraan. Dengan adanya tulisan-tulisan Soekarno memicu berbagai reaksi dan tanggapan dari beberapa tokoh Islam pada masa itu, salah satunya Mohammad Natsir. Menanggapi pandangan Soekarno, Natsir menuliskan responsnya yang kemudian diterbitkan di majalah Al-Lisan dan Panji Islam. Dalam tulisannya, ia mengkritisi gagasan Soekarno serta menegaskan pentingnya keterkaitan antara Islam dan negara. Polemik ini turut memengaruhi keterlibatan Natsir dalam diskusi mengenai hubungan agama dan negara, terutama karena pemikiran Soekarno cenderung mengarah pada sekularisme, yakni pemisahan agama dari urusan kenegaraan, yang terinspirasi dari sistem di Turki.

Sebagai bentuk sanggahan, Natsir berusaha membantah argumen Soekarno dengan menyampaikan pandangannya tentang perlunya integrasi antara Islam dan negara. Natsir menganggap pemikiran Soekarno sebagai distorsi intelektual dan sejarah, terutama jika Soekarno mendukung gagasan Kemal Atatürk yang memisahkan agama dari negara. Dalam pandangan Natsir, negara berperan sebagai alat untuk menerapkan syariat Islam, karena tanpa

dukungan negara, pelaksanaan hukum Tuhan hanya akan menjadi angan-angan. Namun, hal ini tidak berarti Islam mendukung konsep *caesaropapisme*, karena menurut Natsir, *caesaropapisme* bukan bagian dari sistem politik Islam (Rizqi & Ahmad, 2022, p. 10).

Dalam polemik ini Soekarno juga berpendapat bahwa tidak ada *ijma'* ulama yang secara khusus menyatakan bahwa agama harus bersatu dengan negara. Menanggapi hal ini, Mohammad Natsir lalu balik bertanya, bagaimana jika ternyata terdapat *ijma'* yang justru menyatakan sebaliknya apakah Soekarno akan menerimanya atau tetap menolak dengan berbagai alasan yang lain, misalnya dengan mengatakan bahwasannya *ijma'* hanyalah sebuah *gedachte-traditie* (gagasan turun-temurun) yang sebaiknya ditinggalkan?

Dalam artikel selanjutnya, Natsir kembali mempertanyakan perihal *ijma'* ini. Ia bertanya, apakah terdapat *ijma'* yang menyatakan bahwasannya antara agama dan negara tidak perlu bersatu? Jika *ijma'* dijadikan dasar argumen dalam perdebatan ini, maka masing-masing pihak bisa menggunakan alasan yang sama tetapi dengan kesimpulan yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa agama dan negara harus terpisah karena tidak ditemukan *ijma'* yang mewajibkan penyatuannya, sementara yang lain bisa berargumen bahwa agama dan negara harus bersatu karena juga tidak ada *ijma'* yang melarangnya (Tedy, 2016, p. 48).

Natsir juga membantah pernyataan Soekarno yang mengutip Syeikh Abdul Razik dari Mesir dengan mengatakan bahwa Rasulullah hanyalah mendirikan agama saja, tetapi tidak mendirikan negara, Mohammad Natsir menelusuri lebih dalam dan menemukan bahwa Abdul Razik sebenarnya sama sekali tidak pernah mengatakan hal tersebut. Sebaliknya, ia justru mengakui bahwa sesungguhnya Rasulullah telah membawakan kaedah-kaedah dan hukum umum, yang amat banyak berkenaan dengan segala perikehidupan dan urusan-urusan umat. Memang benar, Abdul Razik juga menyatakan bahwa jika semua aturan agama yang berkaitan dengan urusan dunia dikumpulkan, jumlahnya hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah negara modern, terutama dalam hal dasar hukum dan politik. Natsir tidak membantah hal ini. Ia justru setuju bahwa memang tidak banyak aturan

dari wahyu ilahi yang secara spesifik mengatur negara modern. Namun, menurutnya, aturan-aturan yang ada itu sangat penting dan harus diterapkan di setiap negara, baik modern maupun tradisional, demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Baginya, persoalannya bukan terletak pada jumlah aturan yang sedikit atau banyak, melainkan pada apakah aturan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak (Tedy, 2016).

Penutup

Pertentangan gagasan antara Soekarno dan Mohammad Natsir tentang konsep negara Islam mencerminkan perbedaan mendasar dalam memaknai hubungan antara agama dan kekuasaan negara. Soekarno berpandangan bahwa memisahkan agama dari ranah politik adalah cara untuk menjaga netralitas negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atas nama agama. Sebaliknya, Natsir berpendapat bahwa agama, khususnya Islam, memiliki peran penting dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa, sehingga negara justru seharusnya menjadi instrumen untuk menjalankan nilai-nilai syariat. Polemik ini tidak hanya menyuarakan perbedaan pendapat dua tokoh besar, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan dasar-dasar kenegaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini mengungkap bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan hasil dari latar belakang historis, pengalaman politik, serta pemahaman ideologis yang berbeda, dan keduanya memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk arah pemikiran politik Indonesia. Dengan demikian, relasi antara Islam dan negara di Indonesia bukan persoalan yang dapat disederhanakan menjadi sekadar pro atau kontra. Sebaliknya, isu ini merupakan ruang dialog yang terus berkembang, yang membutuhkan pemahaman mendalam, keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan realitas sosial, serta upaya merumuskan sistem pemerintahan yang adil dan mengakomodasi keberagaman.

Daftar Pustaka

- Aminullah, Muhammad Soleh. (2020). "Agama Dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno Tentang Relasi Agama Dan Negara." *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 14(1), 35–50.
<https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>
- Badri, Ainul. (2020). "Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama Dan Negara." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(2), 191–200.
<https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/2814>.
- Dedi, Agus. (2017). "Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, Dan Tan Malaka Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 191–200.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.873>.
- Falah, Saiful. (2012). *Rindu Kependidikan Dan Kepemimpinan M. Natsir*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Falamsyah, Sony. (2018). "Pemikiran Politik Mohammad Natsir Tentang Pemerintahan Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(1), 115–147.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1533>
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. (2021). *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Hukum, Info. "Biografi Soekarno: Bapak Proklamator Dan Presiden Pertama Indonesia." Accessed April 15, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/biografi-soekarno-bapak-proklamator-dan-presiden-pertama-indonesia/>
- Kasenda, Peter. (2014). *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Luth, Thohir. (1999). *M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- MA, Matholiul Ulum Banjaragung. "Biografi Ir. Soekarno, Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia." Accessed June 03, 2024. <https://mamuba.sch.id/read/436/biografi-ir-soekarno-sang-proklamator-kemerdekaan-indonesia-1>.
- Mawaddah, Niswa, Abdul Aziz Hasibuan, Orvina Siahaan, and Marzuki. (2024). "Pemikiran Politik Islam Modern: M. Natsir, Ayatullah Khomeini Dan M.Quraish Shihab." *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(6), 146–53.
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/2389>.
- Mustofa, Imron. (2024). *M. Natsir Peran Dan Sumbangsihnya Bagi Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Rizqi, Retanisa, and Riski Aulia Ahmad. (2022). "Pemikiran Agama Dan Negara Mohammad Natsir." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i1.5113>.
- Setiadi, Andi. (2017). *Hidup Dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa*. Yogyakarta: Laksana.
- Sudarti. (2020). "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik Soekarno Dan Fazlur Rahman." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 69–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1985>.
- Sumanto, Edi. (2021). "Pemikiran Dakwah M. Natsir." *Dawuh: Islamic*

Communication Journal, 2(1), 1–7.

<https://www.siducat.org/index.php/dawuh/article/view/200/163>.

Tedy, Armin. (2016). "Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(11), 39–50.

<https://core.ac.uk/reader/229578950>.